

## PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OLEH PEMERINTAH DESA DI MASBAGIK, LOMBOK TIMUR

### HANDLING THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC AND POLICY IMPLEMENTATION BY THE VILLAGE GOVERNMENT IN MASBAGIK, EAST LOMBOK

Saipul Hamdi<sup>1\*</sup>, Lalu Wiresapta Karyadi<sup>2</sup>, Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq<sup>3</sup>,  
Nurul Haromain<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Mataram, Jl. Majapahit, No. 62 Mataram

\*Penulis korespondensi: [shamdi@unram.ac.id](mailto:shamdi@unram.ac.id)

Diserahkan : 01/04/2023; Diperbaiki : 10/04/2023; Disetujui: 22/05/2023

DOI : 10.47441/jkp.v18i1.327

#### Abstrak

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki hak untuk membuat dan mengatur kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan oleh Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dalam penanganan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, upaya pemerintah desa mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Masbagik Utara Baru, Lombok Timur selama enam bulan (Januari-Juni 2022). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan menerapkan observasi-partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan berkurangnya kegiatan usaha produktif masyarakat, berkurangnya tingkat pendapatan tenaga kerja anggota rumah tangga, serta berkurangnya kesempatan kerja dan peluang usaha. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa di antaranya adalah memanfaatkan Bumdes untuk membantu usaha warga, memberikan BLTD, melakukan sosialisasi tentang dampak bahaya Covid-19 dan pengembangan ekonomi masyarakat dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini. Adapun respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan cukup baik terlihat dari adanya masyarakat yang mengetahui implementasi dan mentaati implementasi kebijakan tersebut.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Covid-19, Ekonomi, Lombok Timur**

#### Abstract

*This research aims to investigate the policies implemented by the Masbagik Utara Baru village government in dealing with the community's economic crisis caused by Covid-19. This study was conducted for six months in Masbagik Utara Baru, East Lombok. (January-June 2022). This study employed a qualitative method with a case study approach. The research uses Participant observation, in-depth interviews, and study documentation as data collection methods. The findings revealed that Covid-19 reduces business activities, affecting household income, job creation, and business opportunities. The village government's efforts include utilizing village-owned enterprises to assist in developing community businesses through direct cash assistance, socialization about the*

*adverse effects of Covid-19, and community economic development strategies during Covid-19. Thus, the community's response to the village's policy execution is positive*

**Keywords: Policy Implementation, Covid-19, Economy, East Lombok**

## PENDAHULUAN

Covid-19 telah menyebar dengan masif ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga sektor-sektor lain akibat kebijakan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan aktivitas sosial (Farid 2020; Setiawan 2020). Di antara dampak pada sektor ekonomi terlihat pada fenomena PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan (Samudro, & Madjid 2020; Joharudin, et al. 2020; Mufida, et al. 2020). Data di lapangan menunjukkan terdapat 1,5 juta pekerja dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan pekerja migran Indonesia (PMI) secara drastic karena lockdown, penurunan manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020, penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I, inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% year-on-year yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020 (Hanoatubun, 2020). Dampak Covid-19 yang begitu luas yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat mendorong penelitian untuk mengeksplorasi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (Yamali & Putri 2020; Hanoatubun 2020).

Sebagai upaya pemerintah mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19, Presiden Joko Widodo mengeluarkan 9 kebijakan pada 24 Maret 2020. Beliau memerintahkan para menteri, gubernur, dan walikota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengalokasikan ulang anggaran percepatan pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi, menjamin ketersediaan bahan pokok diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Jokowi juga meminta program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, memberi tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan, mempercepat implementasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya, dan membayarkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan (Silalahi & Ginting, 2020). Selain itu, presiden juga menyediakan stimulus pada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang mengambil kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubdi (Afiah et al. 2020; Husna 2020)

Langkah pemerintah pusat juga diikuti oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah (Pemda) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dengan cepat mengambil kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi berupa pemangkasan rencana belanja yang bukan prioritas dalam APBD NTB 2020. Kemudian, melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat pengentasan dampak Covid-19 khususnya pada perekonomian masyarakat. Tersedianya bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah. Mendorong UKM/IKM lokal untuk memproduksi Alat Pelindung Diri (APD). Pemprov NTB juga menyiapkan anggaran kurang lebih sebesar Rp 80 miliar untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap ekonomi. Anggaran tersebut disiapkan untuk program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) gemilang selama 3 bulan bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari JPS pusat. JPS Gemilang terdiri dari bantuan yang berupa sembako, produk perikanan, obat-obatan, vitamin dan masker yang mengutamakan penggunaan produk lokal (Maryanti et al., 2020, 53; Khalik 2020, 75). Dari berbagai kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak semuanya berjalan dengan baik,

akan tetapi banyak kendala dan persoalan yang muncul di lapangan terutama di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan oleh pemerintah desa khususnya di Desa Masbagik Utara Baru Lombok Timur dan respons masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan tersebut.

Kegiatan perekonomian di Desa Masbagik Utara Baru dalam dua tahun terakhir (2018-2019) mengalami peningkatan dan berimplikasi bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Sumber pendapatan terbesar masyarakat di Desa Masbagik Utara Baru selain berasal dari sektor pertanian yaitu pada tahun 2018 pendapatan sektor pertanian sebesar Rp. 6.360.899.000,- juga berasal dari sektor kuliner pada tahun 2018 sebesar Rp 4.050.000.000,- (Monografi Desa Masbagik Utara Baru 2018, 13). Namun, setelah terjadinya wabah Covid-19 kehidupan sosial-ekonomi masyarakat bergeser. Ternyata Covid-19 berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Desa Masbagik Utara Baru, terutama dalam hal sosial-ekonomi. Fenomena ini mendorong kami untuk berargumen bahwa Covid-19 telah menggeser aktivitas ekonomi warga termasuk di desa ini dari produktif ke non produktif, bahkan cenderung menghentikan aktivitas perekonomian warga sehingga menimbulkan krisis hebat. Pada saat yang bersamaan, bantuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah membutuhkan monitoring dan evaluasi dalam implementasinya di tingkat desa. Riset penting untuk dilakukan melihat banyaknya ketimpangan akses dan kurang tepatnya sasaran bantuan pemerintah pusat tersebut di lapangan.

Artikel ini juga melengkapi gap tulisan-tulisan sebelumnya terkait dampak Covid-19 di Lombok Nusa Tenggara Barat termasuk tulisannya Hamdi (2022), yang lebih fokus pada stigma sosial yang muncul di masyarakat Lombok terhadap kelompok Jamaah Tabligh yang hadir di acara ijtima internasional di Makassar. Maryanti dkk (2020) melihat pentingnya pemerintah propinsi (Pemprop) NTB dalam membuat beberapa alternatif planing dalam mengatasi dampak Covid-19 terutama dampak ekonomi jangka panjang. Hasil penelitian Maryanti et al., (2020) merekomendasikan dua hal kepada Pemprop NTB yaitu fokus dalam penanganan medis dan fokus menangani dampak negatif Covid-19 pada ekonomi. Sayuti dan Hidayati (2020) juga tidak menyinggung persoalan implementasi kebijakan di tingkat desa. Rosiady hanya fokus pada dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat NTB.

Untuk mempertajam analisa dalam penelitian akan digunakan Teori Tindakan Sosial Max Weber. Teori Tindakan Sosial bertujuan untuk membantu memahami data tentang fenomena pilihan tindakan rasional yang diambil oleh pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan dan implementasinya oleh pemerintah desa. Teori Tindakan Sosial didasari oleh hubungan dan interaksi antara manusia yang memiliki makna dan tujuan. Tindakan ini didahului oleh perilaku dan tindakan sosial pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang (Weber, 1978). Setidaknya terdapat empat tindakan dalam teori Weber yaitu *traditional actions*, *affective action*, *instrumental rationality action*, dan *actions of Value Rationality* (Weber, 1978). Dari empat teori tindakan ini yang paling efektif dalam penanganan Covid-19 adalah teori *instrumental rationality action*, dan *actions of Value Rationality*. Selain teori ini, peneliti juga menggunakan beberapa konsep yang dikembangkan oleh Salisbury dan Heinz (Arifin 2011), yang membagi model kebijakan ke dalam 4 empat tipe, yaitu kebijakan *distributive*, kebijakan *redistributive*, kebijakan *regulatory* dan kebijakan *self regulatory*.

## METODE

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Pujileksono 2016, 48). Lingkup kajian dalam penelitian ini dibatasi pada kebijakan desa yang dibuat dan dilaksanakan di Desa Masbagik Utara Baru sebagai upaya penanggulangan dampak ekonomi masyarakat desa. Unit analisis yang diteliti adalah

pemerintah desa, individu dan masyarakat Desa Masbagik Utara Baru. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, BPD, sekretaris desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Adapun analisa data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Peneliti juga melakukan uji keabsahan data yang meliputi *ujji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas) (Sugiyono 2017, 366).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Ekonomi Warga

Penerapan aturan dan kebijakan pemerintah seperti PSBB berdampak dilarangnya masyarakat melakukan aktivitas berpotensi menimbulkan kerumunan. Aktivitas di pasar, masjid dan ruang publik lainnya dihentikan. Imbasnya, secara gradual, setelah pandemi Covid-19 menyebar dengan cepat, sektor ekonomi khususnya lumpuh total. Persoalan semacam ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat urban, melainkan juga oleh masyarakat desa yang sehari-hari bekerja di sektor informal sebagai pedagang, buruh maupun petani yang sehari-hari berhubungan secara langsung dengan kerumunan masyarakat. Berikut dampak yang dirasakan masyarakat Desa Masbagik Utara Baru akibat pandemi Covid-19 yaitu, pertama, usaha produktif berkurang. Adanya aturan pembatasan sosial di masa pandemi menyebabkan nyaris seluruh aktivitas masyarakat di ruang sosial dihentikan. Termasuk di antaranya berkurangnya kegiatan usaha produktif masyarakat di Desa Masbagik Utara Baru yang menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Implementasi penanganan ekonomi dilakukan berdasarkan fakta dan dinamika masyarakat desa di lapangan.

Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pendapatan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun (Livana et al. 2020, 42). Kondisi ini juga dialami oleh masyarakat di Desa Masbagik Utara Baru, Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Masbagik Utara Baru, Khairul Ihsan bahwa:

*“Dampak pandemi di Desa Masbagik Utara Baru, terhadap perekonomian masyarakat khususnya, sama dengan dengan wilayah-wilayah lainnya karena umumnya masyarakat di desa tersebut sebelum pandemi memiliki motivasi tinggi dalam meningkatkan taraf kehidupannya di bidang ekonomi. Artinya sebelum pandemi tingkat perekonomian masyarakat stabil dan aktivitas masyarakat berjalan normal”.*

Hantaman pandemi Covid-19 ternyata berdampak kuat terhadap pemerintahan desa baru setelah pemekaran dari Desa Masbagik Utara. Kondisi Desa Masbagik Utara Baru sebelum pemekaran dari desa induk sangat tertinggal. Hal tersebut terjadi karena pemerintah desa sebelumnya tidak mengelola desa secara merata. Namun, beberapa tahun setelah pemekaran, Desa Masbagik Utara Baru dapat menyaingi desa induk dari aspek pembangunan fisik maupun pembangunan manusia dan ekonomi. Di tengah kondisi perkembangan ekonomi masyarakat desa yang positif itulah pandemi Covid-19 datang.

Lebih jauh lagi, proses berkurangnya usaha produktif masyarakat disebabkan oleh adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat negara seperti polisi dan TNI. Masyarakat dituntut mematuhi setiap aturan yang diberlakukan sehingga masyarakat mengurungkan keinginan untuk berkumpul dan menjalankan aktivitas sosial di ruang-ruang publik. Pasalnya, ruang-ruang sosial tersebut ditutup dan akses untuk menikmati fasilitas sosial dibatasi.

Kedua, kesempatan kerja berkurang. Berkurangnya tingkat pendapatan tenaga kerja anggota rumah tangga yang disebabkan oleh menurunnya aktivitas di ruang-ruang publik dan terjadinya perubahan tindakan sosial masyarakat yang disebabkan munculnya pandemi Covid-19. Proyek-proyek pembangunan misalnya ditunda, mobilitas masyarakat yang berdampak terhadap usaha transportasi masyarakat dihentikan sementara. Selain itu, peluang usaha di tempat-tempat keramaian ditutup.

Hal tersebut tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Munjizun, Ihun seorang pedagang mengatakan bahwa di Desa Masbagik Utara Baru dampak Covid-19 sangat terasa sekali. Mayoritas pedagang menghentikan aktivitasnya dan menunda rutinitas ke pasar. Namun setelah normal, ia dan pedagang lain kembali beraktivitas meski diwajibkan menerapkan protokol kesehatan pandemi Covid-19 (Wawancara, 21 Maret 2022). Munjizun juga menjelaskan sebagai berikut:

*“Saya sudah putus asa, sebagai pedagang musiman dan buruh bangunan di masa Covid ini tidak dapat berjualan dan kerja proyek. Proyek-proyek bangunan ditunda. Sebagai tukang dan pedagang seperti saya, tidak ada lagi lapangan kerja yang dapat saya harapkan. Soalnya kemampuan saya untuk mencari nafkah hanya itu, selain itu saya tidak dapat kerja apa-apa. Sawah saya tidak ada. Tidak seperti masyarakat yang lain”.*

Berkurangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dalam memutuskan tindakannya untuk melakukan sosialisasi dan memberi BLT, memaksimalkan kehadiran Bumdes.

Ketiga, mobilitas ekonomi dan omset menurun. Berkurangnya omset atau jumlah kegiatan ekonomi yang berakibat menurunnya pendapatan selama pandemi Covid-19. Berkurangnya mobilitas ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19 yang disebabkan karena pemerintah mempertimbangkan aspek kesehatan yang mesti diutamakan. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat menurun drastis karena pembeli tidak seramai di masa sebelum pandemi Covid-19 merebak. Akhirnya barang yang telah dibeli dengan modal yang cukup besar tidak bisa berputar sebagaimana biasanya. Bahkan masyarakat mengeluhkan bahwa jangankan balik modal, yang terjadi malah rugi besar karena sebagian produk jualan seperti makanan dan minuman sebagian besar menjadi tidak layak konsumsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sayuti dan Hidayati pada tahun 2020 dengan judul penelitian Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan dampak pandemi Covid-19 dilihat dari sisi ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden yang sebagian besar menyatakan pendapatan yang diterima mengalami penurunan tetapi masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, lapangan pekerjaan menjadi terbatas, pengeluaran menjadi lebih besar dan didominasi oleh pembelian bahan makanan (Rosiady, 2020).

### **Upaya Pemerintah Desa Terhadap Penanganan Dampak Ekonomi**

Pemerintah desa tidak tinggal diam dalam menghadapi gelombang pasang pandemi Covid-19. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak Covid-19, terutama di sektor ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat desa terpenuhi di tengah terbatasnya akses dan mobilitas sosial ekonomi antar masyarakat. Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru misalnya memiliki upaya yang terukur dalam menanganinya Kepala Desa Masbagik Utara Baru mengungkapkan bahwa:

*“Kebijakan yang disusun di masa Covid-19 tidak bisa sepenuhnya mengharapkan masukan dari masyarakat. Aturan di masa Covid lebih dominan disusun oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah desa hanya menyusun aturan teknis berdasarkan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat”.*

Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru menilai, bahwa mengharapkan masukan yang produktif dari masyarakat tidak mudah. Masyarakat lebih menunggu untuk diatur. Itu sebabnya aturan yang berasal dari pemerintah pusat dirasa cukup untuk mengatur mobilitas masyarakat sehingga pemerintah desa tidak membuat aturan khusus. Namun secara teknis, pemerintah desa mengupayakan dapat menyerap aspirasi masyarakat. Pemerintah desa tidak dimungkinkan menyusun aturan yang berlawanan dengan aturan pusat. Aturan pusat lebih tinggi posisinya dan tidak boleh diubah meski kondisinya kadang bertentangan dengan di lapangan. Intinya pemerintah desa dapat mengutamakan asas kebermanfaatannya sehingga aturan diposisikan secara dinamis dan dapat berjalan efektif.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2021) tentang kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan program inovasi desa (PID) di masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa efektivitas aturan dan upaya pemerintah desa dalam meminimalisir dampak pandemi berhubungan dengan sarana dan prasarana. Potensi meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pendapatan asli desa-nya (PAD) sebagian kecil yang berhasil terrealisasikan, sedangkan sebagian tidak. Hal tersebut disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya sarana prasarana dan minimnya inovasi. Kurangnya sarana prasarana berhubungan dengan upaya dan kebijakan pemerintah desa dalam merealisasikan aturan pemerintah pusat dalam meminimalisir dampak ekonomi dan kesehatan di tengah masyarakat (Wulandari et al. 2021, 4).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Paisal pada tahun 2020 dengan judul *Desa Labbo Melawan Covid-19: Kebijakan Penanggulangan dan Kepatuhan Warga Desa*. Temuannya menunjukkan bahwa di Desa Labbo sebagian besar warga belum mematuhi kebijakan pemerintah terkait pencegahan penularan Covid-19, termasuk anjuran penggunaan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak aman, dan rajin mencuci tangan (Paisal 2020, 9). Berbeda dengan Desa Labbo, Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru bertindak aktif dalam penanganan sosial ekonomi warga pada saat pandemi Covid-19 menghantam sektor ekonomi, kesehatan dan sosial.

Di sektor ekonomi, warga yang bekerja di sektor informal aktivitas ekonominya lumpuh total, pada saat yang sama peran pemerintah desa mutlak dibutuhkan. Upaya pemerintah dalam penanganan ekonomi masyarakat di Desa Masbagik Utara Baru adalah; memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Keberadaan Bumdes menjadi amanah undang-undang untuk mendorong setiap desa membangun Bumdes untuk kebutuhan masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa. Dimasa Covid-19, keberadaan Bumdes menjadi salah satu variabel penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat Desa Masbagik Utara Baru. Hal tersebut sekaligus menjadi kekuatan ekonomi warga. Pengelolaan Bumdes harus berasaskan dari desa untuk masyarakat desa, seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Masbagik Utara Baru:

*“Pengelolaan ekonomi lewat Bumdes dilaksanakan terutama dengan memberdayakan kelompok UMKM yang telah terbentuk sebelumnya, itu sebabnya begitu Covid-19 menyebar dan menghentikan aktivitas ekonomi warga terutama yang bekerja di sektor informal seperti pedagang, buruh, dan petani, Bumdes menjadi harapan utama masyarakat di Desa Masbagik Utara Baru. Masyarakat boleh mengambil sembako dan kebutuhan pokok lainnya di Bumdes*

*dua tiga minggu baru bayar. Itu untuk mempermudah masyarakat agar kebutuhan hidupnya terpenuhi terutama saat Covid-19”.*

Keberadaan Bumdes berperan penting saat Covid-19 mulai meluas. Begitu halnya dengan bantuan sembako dan pangan dilakukan lewat Bumdes. Berdasarkan aturan Pemerintah Pusat Nomor 20 tahun 2021, Bumdes diberikan keleluasaan sebagai penyalur bahkan dapat berperan menjadi pengembang. Aturan tersebut diturunkan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur yang menunjukkan adanya kebijakan, untuk mengarusutamakan keberadaan Bumdes di setiap desa.

Berdasarkan aturan terkait, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan bantuan modal bagi Bumdes supaya dapat berjalan optimal. Pada masa pandemi Covid-19, Bumdes juga digunakan sebagai distributor atau penyalur bantuan sembako ke masyarakat. Meski di satu sisi, lewat kebijakan tersebut distributor yang umumnya berasal dari kalangan aktivis kecewa dengan aturan dari Bupati tersebut.

Bumdes Desa Masbagik Utara Baru selain menyediakan sembako, juga menyediakan jasa percetakan untuk aparat desa maupun siswa di sekitaran Desa Masbagik Utara Baru. Bumdes tersebut mengadopsi retail modern baik dari desain maupun manajemen yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Desain semacam itu dilakukan agar Bumdes dapat bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Begitu halnya dengan pedagang-pedagang di desa dapat menyuplai berbagai produk dari Bumdes seperti yang diungkapkan oleh kepala desa bahwa “Kita niru-niru sedikit. Masyarakat boleh mengambil barang sendiri, seperti di retail modern”.

Seluruh anggaran di Bumdes terutama pengadaan sembako berasal dari anggaran dari desa. Bumdes yang berada di Desa Masbagik Utara Baru sudah bertahan hingga sepuluh tahun. Hal tersebut menurutnya karena manajemen yang dilakukan oleh desa benar-benar dioptimalkan. Bertahan tidaknya Bumdes tergantung pengelola, kalau manajemen tidak dilakukan dengan baik maka akan bubar dengan sendirinya. Karena itu, ia menegaskan bahwa banyak Bumdes di desa-desa lain hanya bertahan namanya saja. Salah satu anggota BPD Desa Masbagik Utara Baru, Dedi mengungkapkan bahwa:

*“Peran Bumdes sangat besar saat masyarakat dihadapkan dengan persoalan pandemi Covid-19. Menjadikan Bumdes sebagai ujung tombak pengendalian dampak ekonomi masyarakat di tengah Covid adalah langkah yang tepat. Peralnya, saat masyarakat membutuhkan dorongan untuk membangkitkan ekonomi yang kian terpuruk akibat Covid, tidak ada unit atau institusi lain selain Bumdes yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah”.*

Sementara itu, Akmal tokoh masyarakat setempat mengungkapkan bahwa:

*“Peran Bumdes di Desa Masbagik Utara Baru telah menjadi sentra aktivitas ekonomi masyarakat. Di masa Covid, Bumdes Masbagik Utara Baru menjadi pusat ekonomi baru bagi masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat lebih dominan menggantungkan kebutuhan ekonominya lewat Bumdes yang dikelola lebih baik di saat pandemi. Adanya episentrum ekonomi baru di desa menyebabkan beban ekonomi warga di masa pandemi tidak separah desa-desa lain yang pengelolaan Bumdes-nya tidak optimal sebagaimana di Desa Masbagik Utara Baru”.*

Eksistensi Bumdes di masa pandemi menemukan momentumnya dalam menjamin kemandirian ekonomi masyarakat. Masyarakat desa tidak melulu bergantung kepada pasar di luar desa karena Bumdes dapat menyediakan kebutuhan ekonomi masyarakat yang diperoleh

lebih mudah daripada toko atau ritel lain. Bumdes menerapkan sistem koperasi sehingga di masa pandemi Covid-19 masyarakat dapat mengambil barang terlebih dahulu dan dapat membayar secara bertahap. Bumdes juga dijadikan sebagai lokus utama distribusi bantuan dari pemerintah pusat, daerah dan kemensos. Peran dan hasil pengelolaan Bumdes lebih besar dari masa pra pandemi. Hingga saat ini PAD terbesar yang diperoleh pemerintah Desa Masbagik Utara Baru di luar anggaran khusus desa berasal dari Bumdes.

Sementara itu, di Desa Besuki dan Cidoro Kabupaten Banyumas, sebagaimana yang ditulis oleh Rosyadi et al. (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan Bumdes tidak begitu optimal terlebih pada masa pandemi Covid-19. Hal itu karna kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa khususnya kepala desa sebagai pemegang tongkat kekuasaan tertinggi di desa. Kurangnya dukungan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran kepala desa dalam pemberian modal kepada Bumdes akan berdampak hukum terhadap kebijakannya.

Berbeda kemudian di Desa Masbagik Utara Baru, sebagaimana paragraf sebelumnya bahwa Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dibawah Kepemimpinan Khaerul Ihsan dengan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak, sangat memberikan dukungan kepada Bumdes. Maka hal-hal semacam itulah yang patut di ikuti oleh pemerintah desa di daerah lainnya, bahwa harus benar-benar mengedepankan kemaslahatan masyarakat lebih-lebih pada masa pandemi Covid-19.

Kedua, bantuan langsung tunai desa (BLTD). Upaya yang dilakukan menghadapi dampak pandemi di ekonomi selain melalui keberadaan Bumdes, pemerintah Desa Masbagik Utara Baru juga mencanangkan anggaran desa yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19 yang juga sudah ditentukan melalui Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. Kebijakan seperti ini bersifat sentralistik yang menuntut pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran desa untuk penanganan ekonomi di masa pandemi Covid-19 melalui BLTD.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang juga berdampak pada pemerintah desa, seluruh desa di tahun 2022 oleh Pemerintah Pusat mengeluarkan Perpres No 104 Tahun 2021 mengenai tindak lanjut dari penggunaan dana desa dengan persentase yang sudah ditentukan yaitu : (1) Untuk bantuan langsung tunai desa BLT untuk masyarakat yang notabene miskin extreme akibat dampak pandemi diberikan persentase 40% minimal dana desa dialokasikan untuk BLTD; (2) 20 % dana desa dialokasikan untuk pemenuhan ketahanan pangan dan hewani dalam rangka stabilitas pemenuhan kebutuhan pangan dan hewani; (3) pencaangan pencegahan pandemi Covid-19 diberikan porsi 8% dari dana desa; (4) 32% menjadi kewenangan desa untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang berskala desa.

Proses penetapan kebijakan menghadapi dampak pandemi di sektor ekonomi diverifikasi oleh tim 9 baru masuk dalam musrembangdes-sus dengan melibatkan BPD dalam rangka penetapan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Salah satu yang menjadi acuan utama tim sembilan dalam proses verifikasi adalah masyarakat yang terdampak sebagaimana termaktub dalam Perpress No 104 tahun 2021.

Setelah itu, berdasarkan hasil musyawarah desa dihimpun lagi oleh tim 9 yang terdiri dari BPD, LKMD, tokoh masyarakat, unsur staff, wanita yang tugasnya menyusun dan memverifikasi menghimpun mana yang menjadi prioritas dalam program desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pertimbangan ketika menyusun kebijakan menghadapi dampak pandemi Covid-19 di sektor ekonomi berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat yang mendesak bukan keinginan pemerintah desa sendiri.

Konteks ruang tempat warga menjalankan aktivitasnya selama pandemi Covid-19 di Desa Masbagik Utara Baru masih didominasi lingkungan agraris di mana warga sehari-hari bekerja sebagai petani. Peran pemerintah desa terhadap warga di masa pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan karena nyaris seluruh aktivitas di luar rumah tidak diperkenankan oleh pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa bahwa:

*“Secara khusus pihak desa tidak membuat aturan spesifik dari desa karena aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terlalu banyak aturan. Pemerintah desa hanya menyampaikan aturan dari pusat dan daerah. Meski di satu sisi persoalan di lapangan tidak sepenuhnya tercover dalam aturan dari pemerintah pusat. Pemerintah desa di satu sisi hanya menerima dampak positif maupun negatif dari aturan pemerintah pusat. Ini persoalannya, pemerintah desa disalahkan kalau tidak disiasati dengan baik”.*

Hal tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan masyarakat berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Melalui proses tersebut, peraturan dari pemerintah pusat sebagai bingkai dalam rangka menyusun kebijakan lebih teknis berdasarkan fakta dan dinamika masyarakat desa di lapangan.

Terdapat pula asas kebermanfaatan yang mbingkai aturan di pusat sehingga tidak serta merta dapat diterima secara kaku oleh Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru namun disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Walaupun muncul protes dari sebagian masyarakat hal tersebut dapat diduga berasal dari suara orang-orang yang mampu. Itu sebabnya kalau tidak diterapkan asas kebermanfaatan pasti akan ada gejolak sosial.

Salah satu strategi untuk menghindari gejolak sosial protes masyarakat yang tidak memperoleh bantuan adalah dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang bekerja di sektor informal tanpa terkecuali secara bergiliran. Karakter masyarakat desa mesti disamaratakan sebab kalau tidak demikian maka akan menjadi sumber masalah baru dan gejolak sosial akan terjadi antara masyarakat dan pemerintah desa.

Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa saat ini dilakukan per triwulan. Durasi waktu pembagian bantuan langsung tunai dari dana desa semacam itu dilakukan karena mengikuti jadwal pencairan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat.

Meski BLT desa dicairkan sekali tiga bulan, namun hal tersebut tidak mengurangi jumlah bantuan yang dibagikan per bulan. Hanya saja waktu pencairan yang berubah. Warga yang menerima bantuan per bulan sebanyak Rp. 300.000 maka per triwulan akan menerima Rp. 900.000. Di satu sisi perubahan jadwal pembagian tersebut dapat memberikan kesempatan kepada warga untuk mengumpulkan bantuan sebagai tambahan modal yang lebih besar dibandingkan dengan pembagian yang dilakukan per bulan bagi para pedagang dan petani (Wawancara, sekretaris desa, 11 Maret 2022).

Bantuan di luar dari BLTD ditentukan sesuai dengan data terpadu dalam *database* Kementerian Sosial yang berbasis *online*. Warga yang terdaftar dalam *database* itu kemudian diprioritaskan terlebih dahulu menerima bantuan dari sejumlah instansi dan BLTD. Menjadi hak warga menerima jumlah uang sesuai aturan, wajib diterima dalam jumlah demikian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris desa bahwa:

*“Yang jelas tiap bulan 100 orang yang berbeda karena kita bicara kesetaraan dan kebermanfaatan. Memang tidak ada aturan tentang itu yang tidak boleh diubah adalah jumlah orang dan jumlah uang. Kalau penerimanya berdasarkan hasil musdes (Musyawarah Desa Khusus). Itu yang kita sisir harus dapat semua”.*

Pada masa pandemi Covid-19, secara ekonomi, masyarakat terdampak luas, itu sebabnya menurut sekretaris desa, mesti ada yang diprioritaskan dalam menerima bantuan terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini, situasi agak lebih normal dibandingkan dengan di saat awal Covid-19 mulai menyebar.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat secara perlahan mulai membaik dan kondusif, meskipun demikian, bantuan pandemi Covid-19 yang berasal dari BLTD pada 2022 lebih besar yang wajib dikeluarkan dari ADD yaitu sebanyak 40 persen, yang diarahkan ke bantuan tunai dana desa. Hal ini berbeda dengan ADD 2021, jumlah ADD yang diperuntukkan untuk bantuan Covid-19 minimal 10 persen tanpa ditentukan batas maksimalnya, tergantung dari kondisi masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Masbagik Utara Baru bahwa:

*“Teknis distribusi bantuan semacam itu dilakukan agar penerima manfaat secara langsung dapat menerima bantuan terutama yang berasal dari dana desa. Pihak pemerintah desa hanya menyediakan anggaran (material) lalu perangkat desa yang menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat. Perangkat desa yang diminta terlibat selain kepala dusun masing-masing juga sekretaris desa dan kepala seksi (Kasi) kesejahteraan”.*

Sementara itu, saat ini setengah dari ADD diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 dengan rincian 700 juta buat BLT Desa Masbagik Utara Baru dan 8 persen dari anggaran desa diperuntukkan untuk pencegahan penanggulangan dan pengadaan rumah isolasi serta honor satgas. Setelah anggaran desa dicairkan, dan bantuan pencairan dana desa, siap didistribusikan, maka pemerintah desa menghubungi kepala dusun setempat untuk membawa warga penerima manfaat ke kantor desa. Selain dengan teknis demikian, pemerintah desa juga memberikan otoritas kepada kepala dusun untuk membagikan bantuan kepada penerima manfaat tanpa memotongnya.

Dalam proses pencairan bantuan, pihak desa meminta kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker saat mengambil bantuan. Jika tidak menggunakan masker maka pemberian bantuan akan ditunda. Belakangan muncul syarat baru yakni masyarakat diwajibkan vaksin agar dapat menerima bantuan. Jika masyarakat belum dan atau menolak vaksin maka bantuan tidak akan diberikan kepada penerima manfaat.

### **Sosialisasi Tentang Dampak dan Bahaya Covid-19 serta Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Salah satu upaya yang juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Masbagik Utara baru adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan penularan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan secara rutin melalui kader dan kepala dusun di setiap dusun masing-masing. Kepala desa mengungkapkan bahwa dia telah memberikan sosialisasi sekaligus melayani masyarakat di manapun, tidak mesti harus ke kantor. Dia kadang meminta masyarakat ke rumah. Misalnya ada yang sakit terus butuh tanda tangannya. Dia melawan birokrasi yang mempersulit masyarakat.

Pemerintah desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 melakukan banyak sosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan dampak pandemi dan solusi untuk mengatasi dampak pandemi. Pemerintah desa dalam rangka menjaga perekonomian masyarakat, upaya yang dilakukan Pemerintah desa membentuk unit-unit kelompok usaha masyarakat (UKM) dengan memberikan pemberdayaan bagaimana tentang usaha dan juga memberikan bantuan permodalan melalui Bumdes.

Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi pemerintah desa untuk terus melakukan sosialisasi secara intensif agar dampak ekonomi dari gelombang pandemi Covid-19 tidak berdampak

terlalu luas. Lewat pendekatan baik melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun kader-kader pemberdayaan yang berada di masing-masing wilayah kekadusan se-Desa Masbagik Utara Baru diharapkan sebagai bentuk antisipasi dini terhadap dampak pandemi Covid-19 terutama di sektor ekonomi masyarakat. Sekretaris desa mengungkapkan bahwa:

*“Kalau desa yang mengadakan sosialisasi maka pasti ada keterwakilan setiap dusun. Semua unsur desa harus lengkap. Secara teknis sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan semua peserta di aula desa. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah menyebarnya Covid-19 di tengah masyarakat. Selain itu, pendekatan pihak desa dalam pencegahan Covid dilakukan lewat ustad”.*

Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru juga menyiapkan rumah isolasi di dua titik. Meski demikian, sejak menyewa tempat isolasi tersebut belum terdapat warga terpapar yang menempatinnya. Pihak desa menurutnya wajib untuk mematuhi regulasi meskipun tidak sejalan dengan dinamika di tengah masyarakat desa. Selain itu, di depan kantor desa, pemerintah desa dan Babinkamtibmas mengadakan razia masker. Bagi yang tidak menggunakan masker maka pemerintah desa menyiapkan dan membagikan masker bagi masyarakat yang diketahui keluar rumah tanpa masker. Pemerintah desa mengaku dilema, di satu sisi aturan harus ditegakkan di sisi lain masyarakat tidak bisa dipaksakan. Kini, sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah desa selama tiga bulan pasca menyebarnya Covid-19 dihentikan dan tidak dilaksanakan lagi.

Khaeril selaku tokoh agama menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa di tengah masyarakat secara umum diterima sepenuhnya. Terlebih pemerintah desa menggandeng tokoh agama untuk melakukan sosialisasi misalnya di masjid, di majelis taklim, maupun di mushalla di perumahan warga. Hal tersebut dilakukan misalnya saat pemerintah pusat mengeluarkan larangan agar menghentikan sementara shalat Jum'at secara berjamaah di masjid. “Begitu halnya saat shalat tarawih dianjurkan di rumah masing-masing, saat idul fitri, sebagian masjid hanya melaksanakan sholat dengan protocol kesehatan tapi tidak melakukan salam-salaman,” ungkap Khaeril, Tokoh Agama di Desa Masbagik Utara Baru.

Sementara itu, tokoh adat, H. Siddik mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan proses adat seperti pernikahan memang tertunda selama pandemi Covid-19. Hal tersebut menyebabkan dirinya di awal menyebarnya pandemi Covid-19 sempat merasa bingung dan sempat tidak percaya adanya pandemi Covid-19. Meski demikian menurutnya, pihak pemerintah desa saat itu sudah mulai melakukan sosialisasi dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat di kantor desa. Setelah diberikan gambaran mengenai bahaya pandemi Covid-19, ia mulai menyadari untuk menjaga kesehatan dan menaati protocol kesehatan.

Setelah memperoleh gambaran mengenai bahaya pandemi Covid-19, ia diminta oleh pemerintah desa untuk turut terlibat dalam sosialisasi di tingkat dusun. Ia pun berupaya menjelaskan mengenai bahaya penyebaran pandemi Covid-19 yang sangat cepat dan dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Ia berupaya juga menahan keinginan masyarakat untuk menggelar prosesi adat dalam pernikahan seperti resepsi dan nyongkolan. Upaya tersebut menurutnya tidak mendapat tantangan yang terlalu berarti di tengah masyarakat. Apa yang disampaikan kepada masyarakat menurutnya dapat diterima secara baik di tingkat terbawah.

Pada dasarnya, masyarakat telah menyadari dan mampu beradaptasi dengan pandemi Covid-19 melalui prokes. Sosialisasi tersebut juga berjalan seiring dengan pelaksanaan pencegahan lewat penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan sesuai protocol kesehatan, hand sanitizer, masker semua diadakan oleh pemerintah Desa Masbagik Utara Baru. Dengan begitu harapannya, masyarakat Desa Masbagik Utara Baru dapat terbiasa dan menjadikannya gaya hidup baru dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

## Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa

Badai pandemi Covid-19 yang tingkat penyebarannya sangat cepat, upaya Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dituntut aktif dan responsif. Dengan begitu dampak yang dirasakan oleh masyarakat baik secara kesehatan, ekonomi dan sosial dapat diminimalisir secara cepat. Itu sebabnya respons masyarakat Desa Masbagik Utara Baru terhadap upaya pemerintah menjadi salah satu aspek penting yang dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah desa dalam penanganan sosial-ekonomi masyarakat di desa yang tergolong “muda” seperti di Desa Masbagik Utara Baru.

Elemen atau kelompok masyarakat dapat dilihat dari profesi sesuai aktivitasnya sehari-hari. Terutama yang bekerja di sektor informal yang menggantungkan hidupnya dari hasil penjualan, upah dan tingkat mobilitas masyarakat, diantaranya dari buruh, petani, dan pedagang. Kelompok masyarakat tersebut sangat merasakan dampak pandemi Covid-19 karena mempengaruhi pendapatannya sehari-hari. Berikut respons kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal yakni pertama, respons kelompok buruh. Kelompok buruh bangunan dan buruh pabrik di Desa Masbagik Utara Baru merasa puas dengan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan di tingkat terbawah. Hal tersebut dirasakan lewat kehadiran Bumdes dan bantuan-bantuan pemerintah desa. Husniawati pembantu rumah tangga mengungkapkan bahwa:

*“Saya merasa kebijakan pemerintah desa di sini sangat baik. Keluarga saya misalnya, dapat mengambil beras dan sembako di Bumdes dan saya diminta membayarnya belakangan. Kalau bantuan uang tunai dari pemerintah kami terima, kami langsung bayar apa yang sudah kami ambil di Bumdes”.*

Para pekerja di sektor informal di Desa Masbagik Utara Baru ini tidak hanya mengalami kerentanan dalam hal kesehatan, akan tetapi dalam hal ekonomi. Mereka cenderung memiliki potensi yang lebih besar untuk tertular virus corona karena tetap beraktivitas di tengah wabah yang semakin meluas. Salah seorang pekerja di bidang informal, Imran mengungkapkan bahwa, para pengemudi ojek, pedagang kecil, mengalami kerentanan tertular karena pekerjaan mereka menuntut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Namun dia tidak punya pilihan lain selain harus tetap bekerja. Soalnya kalau gak kerja, keluarga gak bisa makan. Jayadi seorang penjual makanan menjelaskan bahwa semenjak ada virus corona ini pendapatannya berkurang hingga 70-80%. Para pelanggan pada takut keluar rumah, jadi anjlok penjualannya.

Jayadi mengaku, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan mengonsumsi makanan jualannya. Namun, dia terpaksa harus mengambil modal usaha warungnya ketika dihadapkan dengan kebutuhan bulanan, misalnya untuk membayar listrik, air, dan makanan untuk hewan peliharaannya.

Perbedaan tempat tinggal antara desa dan kota hingga perbedaan kepemilikan properti dan jenis usaha atau pekerjaan, berbeda pula cara mereka bertahan hidup di tengah-tengah krisis. Bagi pekerja rentan yang hidup di daerah perkotaan, tantangan mereka lebih berat, apalagi yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang banyak. Selain harus berpikir bagaimana cara agar tetap bisa makan, mereka juga harus berpikir keras tentang bagaimana cara untuk menyekolahkan anaknya.

Kedua, yaitu kelompok petani. Begitu halnya para petani merasa sangat dibantu oleh kehadiran pemerintah desa. Para petani menjual hasil pertaniannya sebagai modal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah di satu sisi menyebabkan terhambatnya pemasaran berbagai komoditas sayuran sehingga sayuran itu tidak bisa segera sampai kepada konsumen. Agar segera sampai ke konsumen, petani harus menjual

hasil panennya sendiri secara langsung, seperti yang diungkapkan oleh Sumiyah seorang petani sayuran bahwa akibat kebijakan PSBB, sayuran hasil panen yang diambil pengepul mengalami penurunan sehingga mereka harus menjual sendiri ke pasar atau masyarakat sekitar dengan biaya yang lebih tinggi.

Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani tidak semua dapat terserap oleh pasar akibat kebijakan pembatasan sosial. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga turun akibat pendapatan yang menurun. Penurunan daya beli dan tingkat konsumsi pangan masyarakat mengakibatkan penurunan pendapatan petani. Penurunan daya beli masyarakat dan pendapatan petani akibat pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan penurunan nilai tukar petani. Meskipun beberapa perubahan terjadi dalam kegiatan pertanian, kegiatan tersebut masih relatif stabil dibanding dengan perubahan yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki daya tahan terhadap pandemi Covid-19 yang saat ini sedang terjadi.

Ketiga, respons pedagang. Setelah ditutupnya pasar, para petani merasa menemui jalan buntu. Marsinah seorang petani sekaligus pedagang di Masbagik Utara Baru mengungkapkan bahwa dirinya merasa lega karena pemerintah desa sangat sikap merespons kondisi ekonomi para pedagang. Apa yang disampaikan oleh Marsinah dapat dilihat dari bantuan yang diberikan utamanya diprioritaskan untuk para pedagang yang sumber penghasilannya terancam. Meski demikian bantuan pemerintah tersebut tak sepenuhnya dapat menutupi kekurangan kebutuhan sehari-hari para pedagang akibat adanya pandemi Covid-19.

Marsinah sendiri saat menyebarnya pandemi Covid-19 mengalami penurunan pendapatan yaitu sebesar Rp.5.000.000, dengan kata lain, pendapatan Marsinah selama pandemi Covid-19 berkurang hingga 50 persen. Penurunan pendapatan tersebut membuat Marsinah tidak hanya berjualan di pasar tetapi juga berjualan di rumah serta menerapkan sistem mengirimkan barang ke rumah pembeli.

Berdasarkan persepsi dari para pedagang di pasar Masbagik Utara Baru sebelum pandemi Covid-19 keadaan pasar masih membaik/stabil. Keadaan pasar juga masih ramai dan aktivitas jual beli berjalan dengan lancar, pembeli yang berdatangan di pasar pun juga banyak. Kegiatan membeli barang dagangan untuk dijual kembali di pasar juga berjalan lancar.

Selain meresahkan, pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Aktivitas masyarakat yang dibatasi dengan kebijakan *social distancing* dari pemerintah membuat roda perekonomian masyarakat termasuk pasar mengalami penurunan akibat turunnya pendapatan masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh para pedagang terutama pedagang di pasar tersebut.

Informan lainnya juga mengeluhkan penurunan pendapatan mereka sebagai pedagang, seperti yang diungkapkan Tri Hartini, salah seorang pedagang di Desa Masbagik Utara Baru. Dia harus mengurangi pasokan ayam potong. Strategi yang diterapkan Tri Hartini untuk mengurangi kerugian yaitu dengan menjual sisa ayam potong yang tidak laku di pasar dijual kembali di rumah.

Strategi pedagang di pasar untuk memutus rantai pandemi Covid-19 yaitu dengan menggunakan masker saat berjualan di pasar, menyediakan tempat cuci tangan maupun *hand sanitizer* dan menjaga jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Sedangkan strategi pedagang untuk mengurangi kerugian yaitu dengan cara mengurangi pasokan dagangan yang dijual di pasar, ada juga yang menjual dagangan itu secara *online*, bahkan ada juga pedagang yang berjualan tidak setiap hari. Pasar merupakan tempat keramaian dan bahaya terpapar virus pandemi Covid-19 lebih besar. Oleh sebab itu, banyak konsumen takut untuk datang ke pasar dan juga anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja yang membuat penurunan pengunjung di pasar.

## **SIMPULAN**

Covid-19 telah berdampak luas terhadap perkembangan ekonomi masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal. Kebijakan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan sosial masyarakat justru memiliki multi efek termasuk krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dapat dilihat dari berkurangnya kegiatan usaha produktif masyarakat di Desa Mabagik Utara Baru yang menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan, berkurangnya tingkat pendapatan tenaga kerja anggota rumah tangga yang disebabkan oleh menurunnya aktivitas di tempat-tempat umum dan terjadinya perubahan tindakan sosial masyarakat yang disebabkan munculnya Covid-19, berkurangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dalam memutuskan tindakannya untuk melakukan sosialisasi dan memberi bantuan langsung tunai, memaksimalkan kehadiran Bumdes, berkurangnya omset atau jumlah kegiatan ekonomi yang berakibat menurunnya pendapatan usaha dan pemasukan ekonomi keluarga selama Covid-19, berkurangnya mobilitas ekonomi masyarakat selama pandemi yang disebabkan karena pemerintah memberlakukan sejumlah protokoler kesehatan terutama pembatasan sosial.

Upaya pemerintah desa yang dilakukan dalam mengatasi masalah ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 yakni memaksimalkan peran Bumdes sebagai wadah usaha masyarakat. Warga dapat menitip barang-barang mereka untuk dijual di UMKM yang bekerjasama dengan Bumdes. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan BLTD dan melakukan sosialisasi mengenai dampak, bahaya dan pengembangan ekonomi masyarakat dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. Adapun respons masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dalam penanganan ekonomi masyarakat termasuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian masyarakat yang mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pengembangan ekonomi warga.

## **REKOMENDASI**

Salah satu rekomendasi yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah pentingnya upaya inovasi dan terobosan baru oleh pemerintah desa dalam mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 yakni dengan memanfaatkan dan memaksimalkan peran Bumdes. Bumdes memainkan peran penting dalam membantu kelancaran usaha warga yang bekerja sama dengan UMKM-UMKM yang terdapat di desa. Pemanfaatan peran Bumdes ini dapat menjadi percontohan untuk desa-desa lain ketika menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 atau virus-virus lain di masa depan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kami ucapkan ke Prodi Sosiologi yang telah memfasilitasi penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh informan yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai. Begitu juga dengan kolega dan para ahli yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, S., Farida, A. S., & Muslim, J. 2020. "Inovasi kebijakan publik tentang pencegahan dan penanggulangan corona virus disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat." *LP2M*.
- Farid, M. 2020. "Kebijakan politik Presiden Jokowi terhadap masalah kewarganeraan dalam merespons isu global: studi kasus covid-19." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-12.
- Hamdi, S. 2022. "Covid-19, social stigma and changing religious practice in Tablighi Jamaat communities in Lombok, Indonesia." *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 76, 102996.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.102996>
- Hanoatubun, S. 2020. "Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. 2020. "Panic syndrom covid-19: penekanan terhadap kebijakan yang diberikan." *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44-53.
- Khalik, Ahsanul. 2020. *JPS Gemilang, Penguatan UMKM/IKM dan Industrialisasi*. Nusa Tenggara Barat: Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat
- Livana, P. H., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. 2020. "Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa." *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 37-48.  
<https://doi.org/10.37287/ijnhs.v1i1.225>
- Maryanti, S., Netravati, I. G. A. O., & Nuada, I. W. 2020. "Pandemi COVID-19 dan implikasinya pada perekonomian NTB." *Media Bina Ilmiah*, 14 (11), 3497-3508.
- Mufida, S., Timur, F. C., & Waluyo, S. D. 2020. "Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi." *Independen*, 1(2), 121-130.
- Paisal, P. 2020. "Desa Melawan Covid-19: Desa Labbo dalam Kebijakan Penanggulangan Wabah Corona dan Kepatuhan Warga Desa." *MIMIKRI*, 6(2), 205-219.
- Pujileksono, Sugeng. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Rosyadi, S., Setyoko, P. I., Kurniasih, D., Ramadhanti, W., Kusuma, A. S., & Atika, Z. R. 2021. "Penguatan Kapasitas Peran Sosial Bumdes dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi COVID-19." *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 2732  
<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2554>
- Samudro, E. G., & Madjid, M. A. 2020. "Pemerintah Indonesia Menghadapi bencana nasional COVID-19 yang mengancam ketahanan nasional." *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 132-154.  
<https://doi.org/10.22146/jkn.56318>
- Sayuti, R. H., & Hidayati, S. A. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat." *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(2), 133-150.  
<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.46>
- Setiawan, A. 2020. "Politik luar negeri Indonesia era Covid-19: Penyelamatan dan kerjasama." *Independen*, 1(2), 65-74.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. 2020. "Strategi kebijakan fiskal pemerintah indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemi Covid-19." *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167.  
<https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (Vol. 2). University of California press.
- Wulandari, E. A., Afifuddin, A., & Sekarsari, R. W. 2021. “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang).” *Respon Publik*, 15(7), 27-31.  
<https://doi.org/10.35329/mitzal.v7i2.3434>
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. 2020. “Dampak covid-19 terhadap ekonomi indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>